

# DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA DI WILAYAH BEKASI SELATAN

Bayu Seno Pitoyo<sup>1</sup>, Milda Handayani<sup>2</sup>, Choiroel Woestho<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi

<sup>2,3</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi

E-mail: [bayu.seno@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:bayu.seno@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>1</sup>, [milda.handayani@ubharajaya.ac.id](mailto:milda.handayani@ubharajaya.ac.id)<sup>2</sup>,  
[choiroel@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:choiroel@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>3</sup>

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: [bayu.seno@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:bayu.seno@dsn.ubharajaya.ac.id)

## Abstrak

Indonesia sebagai negara yang berkembang, memiliki berbagai macam potensi untuk menjadikan negara ini lebih maju. Salah satu potensi tersebut adalah dari sektor perpajakan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi fiskus mengenai pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bekasi. Metode penelitian memakai analisis regresi linier berganda. Responden yang dipilih adalah fiskus di KPP Pratama Bekasi Selatan. Sampel berjumlah 32 responden dengan teknik pengambilan *purposive sampling*. Data diolah menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) Versi 22. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui nilai sig. t variabel kewajiban kepemilikan NPWP = 0,012, variabel pemeriksaan pajak = 0,049, nilai sig. t variabel sanksi perpajakan = 0,002. Dengan hasil < 0,050, maka dikatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan dapat disimpulkan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

**Kata Kunci** : *Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerimaan Pajak.*

## Abstract

*Indonesia as a developing country has various potentials to make this country more advanced. One of these potentials is from the taxation sector. In this study, the aim of this research is to determine the perception of taxes related to the NPWP obligation, tax audits, and tax obligations on tax revenue at KPP Pratama Bekasi Region. The research method uses multiple linear regression analysis. The selected respondents were the tax authorities at KPP Pratama Bekasi Selatan. A sample of 32 respondents with a purposive sampling technique. Data were processed using SPSS (Statistical Product and Service Solution) Version 22. Based on the research results, it is known that the sig value. t tax identification variable = 0.012, tax audit variable = 0.049, sig. t tax sanction variable = 0.002. With a result <0.050, it is said that the obligation to have NPWP, tax audits, and tax sanctions has a positive effect on tax revenues. In general, it is accepted that the NPWP obligations, tax audits, and tax sanctions can determine tax revenue and may refuse to have a positive effect on tax revenue.*

**Keywords** : *Obligations of NPWP Ownership, Tax Audit, Tax Sanctions, and Tax Receipts.*

## I. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkembang, sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam

potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataannya sekarang, di Indonesia mengalami

berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara (Listyaningtyas, 2012).

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara (Munari, 2005:120).

Pada tahun 2008 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa sunset policy. Kebijakan sunset policy ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sunset policy, pemerintah secara tidak langsung mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Fitriyani dan Wiwik, 2009:89).

Selain mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemerintah juga perlu meningkatkan penegakkan hukum lain. Penegakkan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan sanksi perpajakan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh WP (Sadhani dalam Sukirman, 2011:88).

Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu dapat mencegah penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa (Salib dalam Febrianti, 2013:5).

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhikewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. (Nugroho dalam Renny, 2013).

Berdasarkan pernyataan diatas ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan

pajak yaitu kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan WP sebagai identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011:25). Pemeriksaan pajak adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum. Rahayu (2010) dalam Febrianti (2013). Sanksi perpajakan didefinisikan dalam Mardiasmo (2011:59) yaitu alat pencegah (preventif) agar WP tidak melanggar norma perpajakannya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Dasar Perpajakan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

### Penerimaan Pajak

#### 1. Definisi konseptual.

Variabel dependen dari penelitian ini adalah penerimaan pajak. Menurut Waluyo dan Wirawan (2003) dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Menurut Moh. Zain (2005) dalam Renny (2013) definisi penerimaan pajak adalah gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

#### 2. Definisi Operasional

Indikator penerimaan pajak adalah: 1) Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, 2) Sumber utama penerimaan negara yaitu berasal dari pajak, 3) Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah, 4) Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar Negara (Febrianti, 2013).

## Kewajiban NPWP

### 1. Definisi konseptual.

Nomor Pokok Wajib Pajak atau (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban atas perpajakannya (Mardiasmo, 2011).

### 2. Definisi operasional.

Indikator kewajiban NPWP adalah : 1) Sarana dalam administrasi perpajakan, 2) Tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, 3) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, 4) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan (Febrianti, 2013).

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2009), Tansuria (2010), dan Waluyo (2009) dalam Febrianti (2013). Terdiri dari 10 pernyataan yang menggunakan skala likert, 5 poin yang terdiri dari (5) Sangat setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-ragu, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.

## Pemeriksaan Pajak

### 1. Definisi Konseptual.

Pengertian pemeriksaan pajak adalah menekan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pardiat, 2008).

### 2. Definisi Operasional.

Indikator pemeriksaan pajak adalah: 1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan, 2) SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar, 3) SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar, 4) Adanya dugaan tindak pidana perpajakan, (Febrianti, 2013).

Instrumen pengukuran variabel ini menunjukkan pernyataan yang dikembangkan oleh Rahayu (2010), Pardiat (2008), Waluyo (2008), Mardiasmo (2009) dan Prastowo (2009). Terdiri dari 15 item pernyataan yang menggunakan skala likert poin yang terdiri dari (5) Sangat setuju, (4)

Setuju, (3) Ragu-ragu, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.

## Sanksi Perpajakan

### 1. Definisi Konseptual.

Menurut Mardiasmo (2011), menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bias dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

### 2. Definisi Operasional.

Indikator sanksi perpajakan adalah : 1) memberikan sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, 2) memberikan sanksi kepada WP jika menyembunyikan objek pajaknya, (Herwin, 2010).

Instrumen pengukuran variabel ini menunjukkan pernyataan yang dikembangkan oleh Rahayu (2010), Pardiat (2008), Waluyo (2008), Mardiasmo (2009) dan Prastowo (2009) dalam Febrianti (2013). Terdiri dari 7 item pernyataan yang menggunakan skala likert poin yang terdiri dari (5) Sangat setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-ragu, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.

## Penelitian Terdahulu

Renny Sri Utami (2013) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak (survey pada KPP Pratama di Kanwil Jabar 1). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan sebagai variabel independen mempunyai pengaruh positif pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rony Gunawan (2012) dengan judul "Pengaruh jumlah kepemilikan NPWP, pelaporan SSP, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan pada KPP Pratama Karangayar". Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan pada KPP Pratama Karangayar.

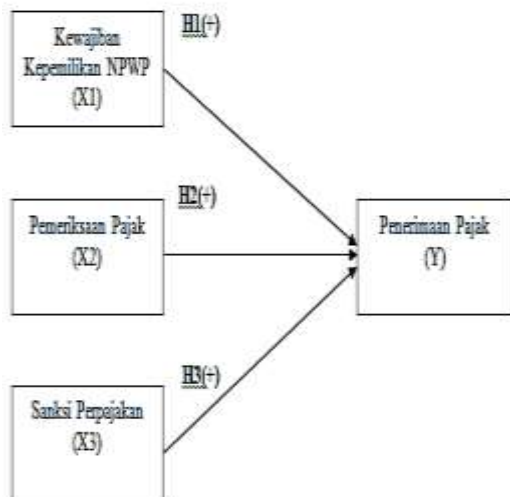
Arya Herwin Safitri (2010) juga melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan kepatuhan

wajib pajak sebagai variabel intervening (studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening (studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Irna Febriyanti (2013) dengan judul “Pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan”. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan.

### Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran yang menjadi proses dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran  
Sumber: data di olah peneliti

### Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Terhadap Penerimaan Pajak

Untuk meningkatkan penerimaan negara pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan berupa kewajiban kepemilikan NPWP bagi masyarakat sebagai identitas Wajib Pajak yang memiliki banyak fungsi dalam bidang perpajakan maupun dalam bidang lainnya, salah satunya dibidang pajak

adalah dalam hal membayar pajak. Dalam hal ini pemerintah melakukan melalui kegiatan ekstensifikasi yang bertujuan dengan menambah Wajib Pajak dengan memberikan NPWP, menyadari bahwa pentingnya kepemilikan NPWP guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang dapat menyelesaikan kewajiban wajib pajaknya. Menurut Febriyanti (2013) menguji kewajiban kepemilikan NPWP pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor pokok yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Setiawan, 2007). Berdasarkan hal tersebut hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

**H1 : Kewajiban NPWP Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak.**

### Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Sistem *self assesment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia sekarang ini menuntut Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan, diharapkan wajib pajak akan semakin patuh dalam pelaporan dan melunasi kewajiban perpajakannya sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Salib dan Wato (2006) dalam Gunawan (2012), pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio laba sebelum pajak berdasarkan rasio laba sebelum pajak terhadap penjualan *Earning Before Tax* (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap penjualan. Menurut Kamila (2010), dalam penelitian yang menguji tingkat kepatuhan, pemeriksaan pajak, serta perubahan penghasilan kena pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Surakarta menyimpulkan bahwa pemeriksaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Begitu pula Penelitian Arya Herwin Safitri (2010), menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin efektif seorang karyawan pemeriksa pajak dalam melakukan setiap tahapan-tahapan pemeriksaan pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 545/KMK.04/2000 dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. (Febriyanti, 2013). Berdasarkan hal yang telah dipaparkan hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

## **H2 : Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak.**

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan alat pemerintah untuk menjamin ketentuan peraturan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi oleh masyarakat didalam suatu negara. Dengan demikian sanksi perpajakan merupakan cara pemerintah agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan yang telah dibentuk oleh negara tersebut.

Menurut Utami (2013), menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah yang positif yang artinya apabila sanksi tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat yang berimplikasi pada implikasi terhadap penerimaan pajak yang terjadi pada KPP Pratama Kanwil Jabar I. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut:

## **H3 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak.**

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Bekasi. Pengambilan data dengan menyebarkan kuesioner penelitian dilakukan bertahap tahun 2019.

#### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Menurut Sarjono dan Julianita (2013:21) sampel adalah bagian dari populasi yang dipercaya dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pajak (fiskus) pada KPP Pratama Bekasi Selatan yang berjumlah 80 orang akan tetapi hanya sebanyak 50 orang yang diperbolehkan untuk

diteliti oleh pihak KPP Pratama Bekasi Selatan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan desain *non probability sampling* dengan kategori pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*). *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2010:122) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Fiskus atau pegawai pajak di KPP Pratama Bekasi.
2. Fiskus yang melayani pelayanan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan.

#### **Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang pengumpulannya menggunakan kuesioner yang disebarkan langsung pada responden. Sumber data disini berasal dari jawaban kuesioner yang disebarkan pada fiskus atau pegawai pajak di KPP Pratama Bekasi. Dan juga menggunakan teknik studi kepustakaan untuk memperoleh dan mengumpulkan teori-teori dari literatur yang berkaitan dengan masalah ini.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey. Metode survey adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan secara langsung dari populasi melalui kuesioner. Dalam penelitian ini kuesioner diberikan langsung kepada fiskus di KPP Pratama Bekasi Selatan.

Survey yaitu untuk pengumpulan data dari suatu sampel digunakan instrumen kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner secara langsung kepada responden yang dijadikan sampel. Penulis menyampaikan kuesioner beserta dengan alternatif jawaban untuk dipilih oleh responden untuk memperoleh data pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak. Skala yang digunakan adalah skala *likert*, skala *likert* menurut Sarjono dan Julianita (2013:6) adalah sebagai berikut: "Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kejadian atau keadaan sosial, di mana variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variable kemudian indikator variable tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun *item-item* pertanyaan".

Tabel 1. Penilaian Skala Likert

No	Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu-ragu(RR)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sarjono dan Julianita (2010)

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat konsistensi instrument apabila diulang kembali. Dalam penelitian ini, reliabilitas *item* kuisioner diuji dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) Versi 22 pada nilai *Cronbach's Alpha* dengan kriteria yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Dari hasil uji reliabilitas instrumen diperoleh data dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerimaan pajak (Y)	0.765	Reliabilitas Tinggi
Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)	0.802	Reliabilitas Sangat Tinggi
Pemeriksaan Pajak (X2)	0.684	Reliabilitas Tinggi
Sanksi Perpajakan (X3)	0.848	Reliabilitas Sangat Tinggi

Sumber: data di olah peneliti

Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian yang terdiri dari variabel Penerimaan pajak (Y), Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) bisa di andalkan (reliabel).

##### Hasil Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui bahwa model regresi memenuhi asumsi normal atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut,

penelitian melakukan uji *kolmogorov smirnov*. Model regresi yang baik adalah memilih distribusi normal atau mendekati normal. Dasar pengabilan keputusan adalah jika angka signifikansi  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal dan sebaliknya jika angka signifikansi  $< 0,05$  maka data berdistribusi tidak normal. Tabel berikut ini merupakan hasil uji *kolmogorov smirnov* dengan menggunakan SPSS V.22.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas		
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.61705478
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.075
	Negative	-.106
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: data di olah peneliti

Dari tabel hasil diatas, diketahui nilai signifikan (*asympt. Sig(2-tailed)*), sebesar  $0,200 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal.

##### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan multikolinieritas yaitu adanya hubungan linier antara variabel independen pada model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak adanya multikolinieritas. Mutikolinieritas terjadi apabila nilai *tolerance*  $< 0,10$  dan *variance inflation factor (VIF)*  $> 10$ . Dari pengolahan statistik diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

**Hasil Uji Multikolinieritas**

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error					
1	(Constant)	3.548	5.888		-.603	.552		
	KKN	.235	.087	.369	2.704	.012	.903	1.107
	PP	.198	.096	.267	2.056	.049	.994	1.006
	SP	.366	.109	.456	3.353	.002	.908	1.101

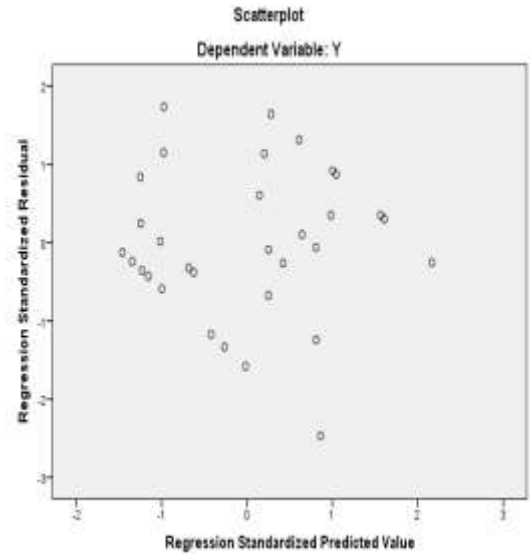
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: data di olah peneliti

Dari hasil diatas dapat diketahui nilai *tolerance* seluruh variabel independen > 0,10. Diantaranya yaitu, variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP (KKN) sebesar 0,903, variabel Pemeriksaan Pajak (PP) sebesar 0,994, dan variabel Sanksi Perpajakan (SP) sebesar 0,908. Begitu juga pada hasil *VIF*, seluruh variabel independen < 10. Diantaranya yaitu, variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP (KKN) sebesar 1,107, variabel Pemeriksaan Pajak (PP) sebesar 1,006, dan variabel Sanksi Perpajakan (SP) sebesar 1,101. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak menunjukkan gejala multikolinieritas.

### Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2009) dalam (Pamungkas, 2014). Cara untuk melihat uji heteroskedastisitas dengan melihat gambar *scatterplot*. Jika gambar *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu maka penelitian ini bebas dari heteroskedasitas. Berikut ini hasil uji heteroskedasitas :



Gambar 2. Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS 22,2019

Gambar-gambar diatas melalui *scatterplot* menggambarkan bahwa distribusi data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Distribusi data penelitian ini acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedasitas.

### Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji analisis regresi linier berganda:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
	(Constant)	3.548	5.888		-.603	.552
	KKN	.235	.087	.369	2.704	.012
	PP	.198	.096	.267	2.056	.049
	SP	.366	.109	.456	3.353	.002

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: data di olah peneliti

Berdasarkan hasil pengolahan di atas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak} = 3,548 + 0,235 \text{ KKN} + 0,198 \text{ PP} + 0,366 \text{ SP}$$

Keterangan:

- a** = Konstanta  
**KKN** = Kewajiban Kepemilikan NPWP  
**PP** = Pemeriksaan Pajak  
**SP** = Sanksi Perpajakan

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan melalui pernyataan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 3,548, artinya jika kewajiban kepemilikan NPWP (KKN), pemeriksaan pajak (PP), dan sanksi perpajakan (SP) nilainya 0, maka penerimaan pajak tetap.
2. Nilai koefisien variabel kewajiban kepemilikan NPWP (KKN) tidak sama dengan nol (KKN= 0,235). Hasil ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara kewajiban kepemilikan NPWP dengan penerimaan pajak. Semakin tinggi fiskus mewajibkan kewajiban kepemilikan NPWP, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.
3. Nilai koefisien variabel pemeriksaan pajak (PP) tidak sama dengan nol (PP = 0,198). Hasil ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak. Semakin tinggi fiskus melakukan pemeriksaan pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.
4. Nilai koefisien variabel sanksi perpajakan (SP) tidak sama dengan nol (SP = 0,366). Hasil ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara sanksi perpajakan dengan penerimaan pajak. Semakin tinggi fiskus memberikan sanksi perpajakan, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

### Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji kelayakan model regresi linier berganda antara variabel independen yaitu kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak mempunyai pengaruh signifikan yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi  $0,00 < 0,05$ .

### Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil sig.  $0,012 < 0,05$ , dengan demikian variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil t-hitung  $2,704 > 1,701$ , maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, dikarenakan kepemilikan NPWP merupakan sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, NPWP juga dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan kepemilikan NPWP menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ina Febriyanti (2013), yang menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini menandakan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak maka fiskus dapat melakukan tindakan dengan mewajibkan kepada WP bahwa dengan memiliki NPWP akan membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sebaliknya jika kewajiban kepemilikan NPWP tidak diwajibkan oleh fiskus, maka penerimaan pajak tidak akan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Setyawan (2007) dalam Ina Febriyanti (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Akan tetapi hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dengan penelitian yang dilakukan Rony Gunawan (2012), yang mengatakan bahwa kepemilikan NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dan penelitiannya dilakukan pada KPP Pratama Karanganyar.

### Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dari tabel 4.18 hasil sig.  $0,049 < 0,05$ , dengan demikian variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil t-hitung  $2,056 > 1,701$ , maka  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, dikarenakan pemeriksaan pajak merupakan alat untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam



rangka memberikan kepastian hukum, keadilan serta pembinaan, untuk menguji SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar, untuk menguji SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar, dan adanya dugaan tindak pidana perpajakan, sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Irna Febriyanti (2013), yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menandakan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak maka dapat dilakukan dengan adanya fiskus yang melakukan pemeriksaan kepada WP. Sebaliknya jika fiskus tidak melakukan pemeriksaan kepada WP, maka penerimaan pajak tidak akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dikatakan Arya Herwin Safitri (2010), menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dengan penelitian yang dilakukan Rony Gunawan (2012), yang mengatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, penelitian itu dilakukan pada KPP Pratama Karanganyar.

#### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak**

Dari tabel 4.18 hasil sig.  $0,002 < 0,05$ , dengan demikian variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil t-hitung  $3,353 > 1,701$ , maka  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, dikarenakan dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan memberikan sanksi kepada wajib pajak jika menyembunyikan objek pajaknya akan menambah penerimaan pajak, dan keadaan ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Renny Sri Utami (2013), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menandakan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak maka dapat dilakukan dengan memberikan sanksi perpajakan kepada WP yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan umum perpajakan. Sebaliknya jika fiskus tidak memberikan sanksi kepada WP yang melanggar tersebut, maka penerimaan pajak tidak akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini juga sejalan

dengan yang dikatakan Mohammad Zain (2007), dalam Renny Sri Utami (2013) menjelaskan bahwa dengan sanksi perpajakan WP akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi dalam perpajakan akan menimbulkan rasa takut yang mampu mencegah terjadinya penyelundupan pajak atau kelalaian pajak yang dilakukan oleh WP. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan WP maka akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak.

#### **V. KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji persepsi fiskus mengenai pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak yang dilakukan pada KPP Pratama di wilayah Bekasi Selatan, dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya maka disimpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kewajiban Kepemilikan NPWP, hasil pengujian hipotesis pada uji t menunjukkan bahwa variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP memiliki nilai sig  $0,012 < 0,05$ , dengan demikian variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil t-hitung  $2,704 > 1,701$ , maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dikarenakan kepemilikan NPWP merupakan sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, NPWP juga dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan kepemilikan NPWP menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. Pemeriksaan Pajak, hasil pengujian hipotesis pada uji t menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai sig.  $0,049 < 0,05$ , dengan demikian variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil t-hitung  $2,056 > 1,701$ , maka  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dikarenakan pemeriksaan pajak merupakan alat untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan serta pembinaan, untuk menguji SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar, untuk menguji SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak

Lebih Bayar, dan adanya dugaan tindak pidana perpajakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

3. Sanksi Perpajakan, hasil pengujian hipotesis pada uji t menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai sig.  $0,002 < 0,05$ , dengan demikian variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil t-hitung  $3,353 > 1,701$ , maka  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dikarenakan dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan memberikan sanksi kepada wajib pajak jika menyembunyikan objek pajaknya akan menambah penerimaan pajak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Febriyanti, Irna. 2013. "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penegihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak". *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*.: Jakarta.
- Ghozali Imam. 2009. "Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS". *Skripsi Badan Penerbit Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Gunawan, Ronny. 2012. "Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan SSP, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Karangayar". *Skripsi Universitas Sebelas Maret*. Surakarta.
- Kamila, Ichwanul. 2010. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak, Serta Perubahan Penghasilan Kena Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Penghasilan WP Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta". *Skripsi Universitas Sebelas Maret*. Surakarta.
- Listyaningtyas, Ella Florentin. 2012. "Efektivitas pelaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak". *Skripsi Universitas Negeri Surabaya* : Surabaya.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Munari. 2005. "Pengaruh Tax payer terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Yogyakarta Satu". *Skripsi Universitas Muhammadiyah* :Yogyakarta.
- Pardiat. 2008. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta :Mitra Wacana Medika.
- Pamungkas, Agus Catur. 2014. "Pengaruh Komite Audit, Penerapan *Good Corporate Governance*, Dan Reputasi Auditor Terhadap Tindakan Pajak Agresif". *Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"*: Jakarta.
- Prastowo, Yustinus. 2009." *Panduan Lengkap Pajak*". Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Sosial)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Safitri, Arya Herwin. 2010. "Pengaruh jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening (studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan)". *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Jakarta.
- Sarjono dan Julianita. 2013. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Deddy Arief. 2007. "Analisis Hubungan antara Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Surat Setoran Pajak dengan Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Palmerah Jakarta)". *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirman. 2011. *Pengaruh Management Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak*.
- Utami, Rahayu Sri. 2013. "Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Impliksainya Terhadap Penerimaan Pajak (KPP Pratama Kanwil Jabar I)". *Skripsi Universitas Komputer Indonesia*. Bandung.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.